

ABSTRAK

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Departemen Ilmu Komunikasi

Maharani

Masyarakat Hukum Adat, Modernisasi dan Konstitusi (analisis wacana konstruksi masyarakat hukum adat dalam program Bicara konstitusi Metro TV)

Tahun Skripsi : 2013 + 232 Halaman

Daftar Pustaka : 18 buku + 1 makalah + 4 sumber internet

Program Bicara konstitusi lahir karena adanya relasi kuasa antara Metro TV sebagai media swasta serta Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki kepentingan berbeda. Melalui isu masyarakat hukum adat kedua pihak mengakomodir kepentingannya dalam durasi 30 menit dengan menciptakan representasi masyarakat hukum adat di Indonesia dalam kondisi saat ini, mengkonstruksikan realitas dan membangun wacana keterbelakangan pada masyarakat hukum adat sesuai dengan ide dan gagasan yang dimilikinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konstruksi masyarakat hukum adat dalam program Bicara Konstitusi Metro TV dan membongkar Ideologi program Bicara Konstitusi episode masyarakat hukum adat. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis wacana kritis model analisis Van Dijk dengan menggunakan analisis teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Data bersumber pada dokumentasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Bicara konstitusi merupakan sebuah program yang mengakomodir dua kepentingan. Pertama, kepentingan politik dengan ideologi demokrasi yang dimiliki Metro TV dengan mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu kebijakan pembangunan nasional. Kedua, sebagai sarana legitimasi yaitu pengukuhan atas kinerja Mahkamah Konstitusi pada masa kepemimpinan Mahfud MD. Dalam hal ini terdapat proses hegemoni pada representasi, konstruksi dan wacana yang dibangun media pada masyarakat hukum adat . Faktor relasi kuasa yang terdapat dalam program Bicara konstitusi membuat rangkaian tiga episode masyarakat hukum adat menjadi ambigu dan berada dalam posisi ketidakonsistenan mengenai apa yang ingin disampaikan kepada khalayak mengenai kondisi masyarakat hukum adat.

